



BUPATI DEMAK
PROVINSI JAWA TENGAH

SALINAN

PERATURAN BUPATI DEMAK
NOMOR 4 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 14
TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA
PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DEMAK,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah, telah ditetapkan Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak, dan perubahannya;
- b. bahwa berdasarkan hasil evaluasi atas dokumen Perjanjian Kinerja (PK) dan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LkjIP) yang dilakukan oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Demak belum sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005–2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun Nomor 5234);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5657) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah;
11. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Demak (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 5);

12. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 – 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Demak Tahun 2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Demak Nomor 11);
13. Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 14) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2017 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 61);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK.

Pasal I

Ketentuan dalam Lampiran II Peraturan Bupati Demak Nomor 60 Tahun 2017 tentang tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 14 Tahun 2017 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Demak (Berita Daerah Kabupaten Demak Tahun 2017 Nomor 61) diubah, dengan perubahan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Demak.

Ditetapkan di Demak
pada tanggal 21 Januari 2019

BUPATI DEMAK,

TTD
HM. NATSIR

Diundangkan di Demak
pada tanggal 23 Januari 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK,

TTD

SINGGIH SETYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019 NOMOR 4

Salinan Sesuai Dengan Aslinya

Mengetahui:

KEPALA BAGIAN HUKUM
SETDA KABUPATEN DEMAK

TTD

MUH. RIDHODHIN, SH. MH.

Pembina Tingkat I

NIP. 19650330 199603 1 001

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 4 TAHUN 2019
 TENTANG
 PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN BUPATI DEMAK
 NOMOR 14 TAHUN 2017 TENTANG PENETAPAN INDIKATOR
 KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK

INDIKATOR KINERJA UTAMA PEMERINTAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2019-2021

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Alasan Pemilihan Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatkan kerukunan antar/intra umat beragama	Kasus konflik antar umat beragama	Meningkatnya kerukunan antar/intra umat beragama	Kasus konflik antar umat beragama	Indikator ini dipilih sebagai upaya untuk meningkatkan kerukunan antar umat beragama melalui penguatan peran FKUB dalam kerukunan antar umat beragama	Menunjuk pada jumlah kasus konflik antar umat beragama	$\Sigma = \text{jumlah kasus konflik antar umat beragama}$	Relatif	Kantor Kesbangpol- linmas
2	Mewujudkan reformasi birokrasi	Skor PMPRB (Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi)	Meningkatnya kapasitas sumber daya aparatur	Persentase ASN yang memiliki pendidikan pasca sarjana	Indikator ini dipilih untuk Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur melalui peningkatan jenjang pendidikan formal	Menunjuk pada jumlah ASN yang berpendidikan pasca sarjana dibagi jumlah seluruh ASN dikali seratus persen	$\Sigma = (\text{jumlah ASN yang berpendidikan pasca sarjana}) / (\text{jumlah seluruh ASN}) \times 100\%$	Kumulatif	BKPP
			Meningkatnya akuntabilitas kinerja aparatur	Nilai SAKIP	indikator ini dipilih untuk Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur melalui peningkatan nilai LKjIP	Menunjuk pada nilai dari Menpan RB atas hasil evaluasi akuntabilitas	$\Sigma = \text{penilaian dari Kemenpan RB atas akuntabilitas kinerja}$	Relatif	Inspektorat, Bagian Orpeg Setda

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Alasan Pemilihan Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						kinerja instansi pemerintah	<i>instansi pemerintah</i>		
			Meningkatnya nilai laporan keuangan daerah	Opini BPK	indikator ini dipilih untuk Meningkatkan akuntabilitas kinerja aparatur melalui nilai opini BPK atas Laporan Keuangan	Menunjuk pada opini BPK atas hasil pemeriksaan laporan keuangan dan aset daerah	$\Sigma = \text{nilai opini BPK atas laporan keuangan tahun } (n-1)$	Relatif	BPKPAD, Inspektorat
			Terwujudnya Smart City	Jumlah sistem informasi pelayanan publik berbasis IT yang terintegrasi	Indikator ini dipilih sebagai upaya untuk mempercepat perwujudan Smart City melalui pembuatan sistem informasi pada pelayanan publik (pendidikan, kesehatan, penanaman modal, kependudukan catatan sipil, pengelolaan SDA dan Perumahan serta penanggulangan kemiskinan), Peningkatan pemahaman masyarakat dalam penerapan <i>Smart city</i>	Menunjuk pada jumlah sistem informasi yang pelayanan berbasis IT yang terintegrasi	$\Sigma = \text{Jumlah sistem informasi pelayanan publik yang terintegrasi}$	Kumulatif	Dinkominfo

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Alasan Pemilihan Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
3	Meningkatkan produktivitas dan produksi pertanian, perkebunan, peternakan dan perikanan kelautan menuju kedaulatan pangan	Nilai Tukar Petani	Meningkatnya poduktivitas dan produksi pertanian tanaman pangan dan hortikultura, perkebunan dan peternakan	Produksi pertanian tanaman pangan utama padi	indikator ini dipilih sebagai upaya untuk peningkatkan poduksi tanaman padi dari tahun sebelumnya	menunjuk pada jumlah produksi pertanian tanaman padi (ton) yang dihasilkan selama 1 tahun	$\Sigma = \text{jumlah produksi tanaman padi (ton) dalam 1 tahun}$	Kumulatif	Dinpertan Pangan
				Produksi pertanian tanaman pangan utama jagung	indikator ini dipih sebagai upaya untuk peningkatkan poduksi tanaman jagung dari tahun sebelumnya	menunjuk pada jumlah produksi pertanian tanaman jagung (ton) yang dihasilkan selama 1 tahun	$\Sigma = \text{jumlah produksi tanaman jagung (ton) dalam 1 tahun}$	Kumulatif	Dinpertan Pangan
				Produksi pertanian tanaman pangan utama kacang hijau	indikator ini dipih sebagai upaya untuk peningkatkan poduksi tanaman kacang hijau dari tahun sebelumnya	menunjuk pada jumlah produksi pertanian tanaman kacang hijau (ton) yang dihasilkan selama 1 tahun	$\Sigma = \text{jumlah produksi tanaman kacang hijau (ton) dalam 1 tahun}$	Kumulatif	Dinpertan Pangan
			Meningkatnya produksi perikanan dan kelautan	Jumlah produksi perikanan tangkap	Indikator ini dipilih dalam rangka peningkatan produksi perikanan dan kelautan melalui pertumbuhan produksi perikanan tangkap	Menunjukkan jumlah Produksi Perikanan Tangkap	$\Sigma = \text{jumlah produksi perikanan tangkap}$	Kumulatif	Dinas Kelautan & Perikanan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Alasan Pemilihan Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Meningkatnya ketersediaan, distribusi, keanekaragaman dan keamanan pangan.	Ketersediaan pangan Utama	Indikator ini dipilih sebagai upaya peningkatan ketersediaan pangan utama	Ketersediaan pangan adalah tersedianya pangan dari hasil produksi dalam negeri dan/atau sumber lain	$\Sigma = \text{Konversi dari jumlah produksi padi (ton) GKG ke beras (ton)}$	Kumulatif	Dinas Pertanian dan Pangan
4	Meningkatkan kinerja perindustrian dan perdagangan serta kapasitas koperasi dan UMKM	Pertumbuhan Ekonomi	Meningkatnya perkembangan industri kecil dan menengah	Persentase pertumbuhan industri kecil menjadi industri menengah	Pengembangan industri kecil menengah dan besar difokuskan pada pembinaan industri kecil menjadi industri menengah serta daya saing produk unggulan	Menunjukkan pertumbuhan jumlah perusahaan industri kecil menjadi menengah dari tahun ke tahun	$\Sigma = \text{Jumlah industri kecil menjadi menengah tahun } n / \text{jumlah industri kecil menjadi menengah tahun } (n-1) \times 100\%$	Kumulatif	Dinnakerind
			Meningkatnya nilai ekspor	Nilai bersih ekspor perdagangan	peningkatan nilai ekspor bisa dilihat dari nilai bersih ekspor perdagangan	Ekspor Bersih Perdagangan merupakan selisih antara nilai ekspor dengan nilai impor.	$\Sigma = \text{nilai ekspor} - \text{nilai impor}$	Kumulatif	Dindagkop UKM
			Meningkatnya kapasitas UMKM dan koperasi	Persentase pertumbuhan usaha mikro menjadi usaha kecil	Peningkatan usaha mikro kecil difokuskan pada pertumbuhan usaha kecil, dan pengembangan usaha	Menunjukkan perkembangan pertumbuhan usaha Mikro menjadi usaha Kecil dalam kurun waktu setahun	$\Sigma = \text{Jumlah usaha mikro yang menjadi usaha kecil tahun } n / \text{jumlah usaha mikro}$	Kumulatif	Dindagkop UKM

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Alasan Pemilihan Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					mikro menjadi usaha kecil		<i>yang menjadi usaha kecil tahun (n-1) x 100%</i>		
				Persentase koperasi yang mengalami peningkatan SHU lebih 5%	Peningkatan kualitas koperasi ditandai dengan meningkatnya sisa hasil usaha sebesar $\geq 5\%$	Menunjukkan jumlah koperasi yang mengalami peningkatan SHU $\geq 5\%$ dalam tahun berjalan	$\Sigma = \text{Jumlah koperasi yang mengalami peningkatan SHU} \geq 5\% / \text{jumlah seluruh koperasi} \times 100\%$	Kumulatif	Dindagkop UKM
5	Meningkatkan kompetensi dan daya saing tenaga kerja	PDRB per Kapita	Menurunnya angka pengangguran	TPT (tingkat Pengangguran Terbuka)	Pengurangan pengangguran terbuka difokuskan pada peningkatan kapasitas calon tenaga kerja dan penempatan tenaga kerja	Menunjukkan persentase angkatan kerja yang menganggur/mencari pekerjaan	$\Sigma = \text{Jumlah penganggur terbuka usia angkatan kerja} / \text{Jumlah penduduk angkatan kerja} \times 100\%$	Relatif	Dinnakerind
6	Meningkatkan daya saing pariwisata dan pelestarian kebudayaan	PDRB sektor pariwisata	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan	Pertumbuhan Jumlah kunjungan wisatawan	Peningkatan daya saing sektor pariwisata difokuskan pada peningkatan jumlah wisatawan yang pada akhirnya akan berkontribusi	Menunjukkan jumlah pertumbuhan wisatawan yang berkunjung selama setahun	$\Sigma = \text{jumlah wisatawan yang berkunjung pada tahun } n / \text{jumlah wisatawan}$	Kumulatif	Dinas Pariwisata

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Alasan Pemilihan Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					pada Pendapatan Asli Daerah		<i>yang berkunjung pada tahun $n-1 \times 100\%$</i>		
			Meningkatnya pelestarian keragaman dan Kekayaan budaya daerah	Persentase Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan	Peningkatan daya saing sektor pariwisata difokuskan pada pelestarian keragaman dan kekayaan budaya daerah	Menunjukkan pada perbandingan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan dengan Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang ada	$\Sigma = \text{jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang dilestarikan} / \text{jumlah Benda, Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang ada} \times 100\%$	Kumulatif	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
7	Meningkatkan infrastruktur dasar perdesaan dan perkotaan	Persentase Panjang Jalan Dalam Kondisi Baik	Meningkatnya kualitas kondisi jalan	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar difokuskan pada perbaikan jalan kondisi buruk, pembangunan jaringan irigasi pada wilayah selatan Kabupaten Demak dan drainase	Proporsi panjang jaringan jalan dalam kondisi baik adalah panjang jalan kota dalam kondisi baik dibagi dengan panjang jalan secara keseluruhan.	$\Sigma = \text{panjang jalan kota dalam kondisi baik} / \text{panjang seluruh jalan kota yang ada} \times 100\%$	Kumulatif	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Alasan Pemilihan Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Meningkatnya kualitas drainase	Drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar difokuskan pada perbaikan jalan kondisi buruk, pembangunan jaringan irigasi pada wilayah selatan Kabupaten Demak dan drainase	Menunjukkan persentase panjang drainase dalam kondisi baik/ pembuangan aliran air tidak tersumbat	$\Sigma = \text{Luas Irigasi Kabupaten dalam Kondisi baik} / \text{luas irigasi kabupaten } X \times 100\%$	Kumulatif	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
		Persentase Luas daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Terpeliharanya jaringan irigasi yang berkelanjutan	Persentase Luas daerah irigasi kabupaten dalam kondisi baik	Peningkatan kualitas infrastruktur dasar difokuskan pada perbaikan jalan kondisi buruk, pembangunan jaringan irigasi pada wilayah selatan Kabupaten Demak dan drainase	Menunjukkan persentase luas irigasi Kabupaten dalam kondisi baik	$\Sigma = \text{Panjang drainase yang tidak tersumbat (km)} / \text{panjang saluran drainase } X \times 100\%$	Kumulatif	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Alasan Pemilihan Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
8	Meningkatkan kualitas lingkungan permukiman yang layak dan mendorong masyarakat untuk mampu memenuhi kebutuhan permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan di perkotaan dan perdesaan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Terpenuhinya sarana dan prasarana permukiman yang sehat, teratur dan berkelanjutan	Jumlah Rumah Tidak Layak Huni	Pemenuhan sarana dan prasarana permukiman sehat di fokuskan pada penyediaan air bersih pada semua penduduk, penataan kawasan kumuh dan peningkatan akses sanitasi dasar.	Menunjuk pada semakin berkurangnya Jumlah Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Demak	$\Sigma = \text{Jumlah Rumah Tidak Layak Huni}$	Kumulatif	Dinas Perumahan dan Pemukiman

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Alasan Pemilihan Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
9	Meningkatkan kualitas penataan ruang dan ruang terbuka hijau	Persentase tersedianya luasan RTH publik dari luas wilayah kawasan perkotaan	Meningkatannya pengendalian pemanfaatan ruang (Tersedianya RTH)	persentase tersedianya luasan RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kawasan perkotaan	Peningkatan Pengendalian Pemanfaatan ruang difokuskan pada tersedianya luasan RTH Publik sebesar 20% dari luas wilayah kawasan perkotaan	Penyediaan Ruang Terbuka Hijau (RTH) Publik adalah penyediaan RTH yang dimiliki dan dikelola oleh Pemerintah Daerah Kota/Kabupaten yang digunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum. Dalam SPM ini, ditargetkan terpenuhinya RTH publik sebesar 20% dari luas wilayah kota/kawasan perkotaan sampai akhir tahun rencana (RTR masing-masing kabupaten/kota).	$\Sigma = \text{Jumlah Akhir Tahun Pencapaian SPM Luasan RTH Publik yang tersedia/jumlah wilayah kota atau kawasan perkotaan luasan RTH yang seharusnya} \times 100 \%$	Kumulatif	Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Alasan Pemilihan Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
10	Meningkatkan pelayanan transportasi dan perhubungan	Tersedianya angkutan umum yang melayani wilayah yang telah tersedia jaringan jalan (jalan provinsi, kabupaten dan nasional)	Meningkatnya pelayanan perhubungan darat	Persentase sarana perlengkapan jalan dalam kondisi baik	Peningkatan pelayanan perhubungan darat difokuskan pada penyediaan sarana jalan rambu rambu lalu lintas.	Menunjuk jumlah sarana perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik dibandingkan dengan sarana perlengkapan jalan yang ada	$\Sigma = \text{jumlah sarana perlengkapan jalan yang berfungsi dengan baik} / \text{sarana perlengkapan jalan yang ada} \times 100 \%$	Relatif	Dinas Perhubungan
11	Meningkatkan ketersediaan, kualitas, kesetaraan, keterjangkauan dan kepastian dalam memperoleh pelayanan pendidikan	Angka Harapan lama sekolah	Meningkatnya aksesibilitas dan kualitas pendidikan	APK SMP/MTS	APK mencerminkan keberhasilan program pembangunan pendidikan yang diselenggarakan dalam rangka memperluas kesempatan bagi penduduk untuk mengenyam pendidikan.	APK SMP/MTS adalah perbandingan jumlah siswa pada tingkat pendidikan SMP/MTS/Paket B dibagi dengan jumlah penduduk berusia 13 hingga 15 tahun	$\Sigma = (\text{jumlah siswa pada tingkat pendidikan SMP/MTS/Paket B}) / \text{jumlah penduduk berusia 13 hingga 15 tahun} \times 100 \%$	Relatif	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
				% sekolah dasar yang terakreditasi minimal B	Peningkatan kualitas pendidikan difokuskan pada penyediaan fasilitas layanan pendidikan	Mengacu pada jumlah sekolah dasar yang berhasil	$\Sigma = \text{jumlah SD yang terakreditasi B dan terakreditasi A} / \text{jumlah}$	Relatif	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Alasan Pemilihan Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					yang bermutu dan memenuhi standar	memperoleh status akreditasi B dan A	<i>seluruh SD x 100%</i>		
				% SMP yang terakreditasi minimal B		Mengacu pada jumlah SMP yang berhasil memperoleh status akreditasi B dan A	$\Sigma = \text{jumlah SMP yang terakreditasi B dan terakredias i A} / \text{jumlah seluruh SMP} \times 100\%$	Relatif	Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
12	Meningkatkan kualitas derajat kesehatan masyarakat	Angka Usia Harapan Hidup	Meningkatnya kualitas kesehatan masyarakat dan pelayanan kesehatan	AKI (Angka Kematian Ibu)	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat difokuskan pada penurunan AKI, AKB, AKABA, gizi buruk, peningkatan kualitas FKTP, pembangunan Rumah Sakit Tipe D di daerah Karangawen dan peningkatan perilaku hidup bersih dan sehat	Angka Kematian Ibu atau AKI adalah banyaknya wanita yang meninggal dari suatu penyebab kematian terkait dengan gangguan kehamilan atau penanganannya (tidak termasuk kecelakaan atau kasus insidental) selama kehamilan, melahirkan dan dalam masa nifas (42 hari setelah melahirkan) tanpa memperhitungkan lama kehamilan	$\Sigma = \text{Jumlah kematian ibu berkaitan dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas pada tahun tertentu} / \text{Jumlah Kelahiran Hidup pada Tahun yang sama} \times 100\%$	Relatif	Dinas Kesehatan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Alasan Pemilihan Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
						per 100 000 kelahiran hidup.			
				AKB (Angka Kematian Bayi)	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat difokuskan pada penurunan AKB	Angka Kematian Bayi atau AKB adalah banyaknya bayi yang meninggal sebelum mencapai usia 1 tahun per 1000 kelahiran hidup pada tahun yang sama.	$\Sigma = \text{Jumlah Bayi yang meninggal sebelum Usia 1 tahun} / \text{Jumlah Kelahiran Hidup pada Tahun yang sama} \times 1000$	Relatif	Dinas Kesehatan
				Prevalensi Gizi buruk	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat difokuskan pada penurunan Gizi Buruk	rasio balita penderita gizi buruk terhadap populasi balita yang ada di tahun yang sama	$\Sigma = \text{Jumlah Balita yang menderita gizi buruk} / \text{Jumlah balita pada Tahun yang sama} \times 100\%$	Relatif	Dinas Kesehatan
				Rasio Rumah Sakit per satuan Penduduk	Peningkatan derajat kesehatan masyarakat difokuskan pemenuhan fasilitas pelayanan kesehatan pada pembangunan Rumah Sakit tipe D	Jumlah rumah sakit dibandingkan dengan jumlah penduduk pada satuan tertentu	$\Sigma = \text{jumlah Rumah Sakit per 100.000 penduduk}$	Relatif	Dinas Kesehatan

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Alasan Pemilihan Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
13	Meningkatkan jaminan dan perlindungan sosial dan penurunan angka kemiskinan	Angka Kemiskinan	Meningkatnya perlindungan sosial pada masyarakat	Persentase angka PMKS	Penanganan PMKS difokuskan pada fakir miskin, penyandang disabilitas dan anak terlantar, Program keluarga harapan serta penguatan kelembagaan penanganan PMKS	Merujuk pada persentase jumlah PMKS di wilayah Kabupaten Demak dalam setahun	$\Sigma = \frac{\text{Jumlah PMKS}}{\text{jumlah seluruh penduduk Kabupaten Demak}} \times 100\%$	Relatif	Dinsos P2PA
14	Meningkatkan keamanan, ketenteraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat	Angka kriminilitas	Menurunnya angka kriminalitas	Persentase penurunan angka kriminalitas	Peningkatan ketertiban, keamanan dan perlindungan masyarakat difokuskan pada peningkatan patroli pada daerah rawan.	Keamanan, ketertiban dan penanggulangan kriminalitas merupakan salah satu prioritas untuk mewujudkan stabilitas penyelenggaraan pemerintahan terutama di daerah.	$\Sigma = \frac{\text{Angka kriminalitas tahun } n}{\text{angka kriminalitas tahun } n-1} \times 100\%$	Relatif	Satpol PP

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Alasan Pemilihan Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	Mengembangkan potensi pemuda dalam olahraga dan pembangunan.	Prestasi pemuda di lingkup provinsi maupun nasional	Meningkatnya prestasi pemuda dan olahraga	Jumlah medali olahraga yang diterima	indikator ini dipilih sebagai upaya Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga difokuskan pada jumlah medali olahraga yang diterima	Hasil Perolehan medali (Emas, Perak, Perunggu) dari atlet-atlet Kab. Demak dalam kejuaraan olahraga tingkat karesidenan, Propinsi, Nasional, Regional dan Internasional	$\Sigma=(Emas+perak+perunggu)$	Kumulatif	Dinpora
				Presentase organisasi pramuka aktif	indikator ini dipilih sebagai upaya Peningkatan prestasi pemuda dan olahraga difokuskan pada jumlah medali olahraga yang diterima	Menunjuk pada perbandingan jumlah organisasi Pramuka Aktif dengan Seluruh Organisasi Pramuka yang ada	$\Sigma=(jumlah\ organisasi\ pramuka\ yang\ aktif)/(jumlah\ organisasi\ yang\ ada) \times 100\%$	Relatif	Dinpora
16	Mengembangkan potensi kesenian lokal	Jumlah kesenian lokal yang dilestarikan	Meningkatnya pelestarian kesenian Lokal	Jumlah kesenian lokal yang dilestarikan	Peningkatan Pelestarian Kesenian Lokal dilakukan dengan peningkatan Jumlah kegiatan dalam rangka pelestarian kesenian lokal	Menunjuk pada banyaknya Kesenian Lokal yang dilestarikan	$\Sigma= Jumlah\ kesenian\ lokal\ yang\ dilestarikan$	Kumulatif	Dindikbud
17	Mengendalikan pertumbuhan penduduk	Pertumbuhan penduduk	Terkendalinya pertumbuhan penduduk	<i>Total Fertility Rate (TFR)</i>	Pengendalian pertumbuhan penduduk difokuskan pengurangan	Merujuk pada perbandingan jumlah anak	$\Sigma=jumlah\ ana/jumlah\ keluarga \times 100\%$	Kumulatif	Dinpermasdes P2KB

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Alasan Pemilihan Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
					unmetneed dan pengendalian jumlah anggota keluarga	dengan jumlah keluarga			
18	Meningkatkan keberdayaan masyarakat, perlindungan perempuan dan anak	Indeks Pemberdayaan Gender (IDG)	Meningkatnya kesetaraan dan keadilan gender dan perlindungan anak	Menurunnya kasus kekerasan terhadap anak	Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak difokuskan pada menurunnya kasus kekerasan terhadap anak	Menunjuk pada jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan dan tertangani	$\Sigma = \text{jumlah kasus kekerasan terhadap anak yang dilaporkan dan tertangani}$	Relatif	Dinsos P2PA
				Kasus Kekerasan terhadap Perempuan yang ditangani	Peningkatan kesetaraan dan keadilan gender serta perlindungan anak difokuskan pada penanganan kekerasan perempuan	Menunjuk pada jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan tertangani	$\Sigma = \text{jumlah kasus kekerasan terhadap perempuan yang dilaporkan dan tertangani}$	Relatif	Dinsos P2PA
19	Meningkatkan nilai dan jumlah investasi serta kualitas pelayanan publik Kabupaten Demak	Nilai Realisasi Investasi	Meningkatnya jumlah investasi baik PMA maupun PMDN	Nilai Investasi PMA	Peningkatan investasi difokuskan pada peningkatan pelayanan perijinan dan non perijinan	Menunjuk pada jumlah nilai investasi Penanaman Modal Asing	$\Sigma = \text{jumlah nilai investasi Penanaman Modal Asing}$	Relatif	Din PM PTSP
				Nilai Investasi PMDN	pada PTSP	Menunjuk pada jumlah nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri	$\Sigma = \text{jumlah nilai investasi Penanaman}$	Relatif	Din PM PTSP

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Alasan Pemilihan Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
							<i>Modal Dalam Negeri</i>		
			Meningkatnya kualitas pelayanan publik berdasarkan standar pelayanan	Rata-rata Indeks Kepuasan Masyarakat (Nilai Survei Kepuasan Masyarakat)	Peningkatan pelayanan public difokuskan pada peningkatan kepuasan masyarakat atas pemberian pelayanan di PD yang memberikan pelayanan publik	Indeks kepuasan masyarakat bertujuan untuk mengukur kepuasan masyarakat sebagai pengguna layanan dan meningkatkan kualitas penyelenggaraan pelayanan publik. Semakin tingginya nilai IKM berbanding dengan tingginya nilai kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik yang diberikan oleh unit penyelenggara pelayanan publik yang ada di lingkungan pemerintah kabupaten Demak.	$\Sigma = \text{Total dari nilai persepsi per unsure} / \text{total unsur yang terisi} \times \text{nilai penimbang}$	Relatif	Bagian Orpeg-Setda

No	Tujuan	Indikator Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran (IKU)	Alasan Pemilihan Indikator	Definisi Operasional	Formulasi Perhitungan	Tipe Perhitungan	Sumber Data
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	Mengendalikan kualitas lingkungan hidup	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Meningkatnya perbaikan kualitas lingkungan	Indeks Kualitas Lingkungan Hidup	Peningkatan kualitas sumberdaya lingkungan difokuskan pada pencegahan terjadinya pencemaran, penanaman mangrove di wilayah pesisir dan kebersihan kota perbaikan kualitas lingkungan	Menunjuk pada jumlah / indeks kualitas lingkungan hidup	$\Sigma = (30\% \times IPU) + (30\% \times IPA) + (40\% \times ITH)$ <p><i>IPU=Indeks Pencemaran Udara;</i> <i>IPA= Indeks Pencemaran Air</i></p>	Relatif	DLH

BUPATI DEMAK,

TTD

HM. NATSIR